

JURNAL HI

Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta

Dhita Novebrin Nidia

[SUNSHINE POLICY PADA MASA PEMERINTAHAN PRESIDENT LEE MYUNG BAK]

Sebuah penelitian mengenai Sunshine Policy pada masa pemerintahan lee myung bak serta alasan dihentikan nya Sunshine Policy pada masa pemerintahan yang sama.

SUNSHINE POLICY PADA MASA PEMERINTAHAN PRESIDENT LEE MYUNG BAK

(Sunshine Policy Under The Administration Of President Lee Myung Bak)

Dhita Novebrin Nidia

Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Ringroad Barat, Kasihan, Bantul, DIY, Indonesia 55183

dhita.novebrin@gmail.com

ABSTRACT

Korean Peninsula conflict has lasted long enough, after the second world war, the Korean peninsula was divided into two areas, North Korea and South Korea. since then attempts to unify Korea often made by both sides (South Korea and North Korea). but the different of ideological makes Korean unification efforts be difficult to achieve, because each party uses its own way to unify Korea. including make a policy called Sunshine Policy. This study actually explain about Sunshine Policy and the reasons why President Lee Myung Bak did not use Sunshine Policy as South Korea's Foreign Policy to North Korea in Korean reunification efforts. This study will give us the answer because Presiden Lee Myung Bak actually has the reasons for it.

Keywords: *Sunshine Policy, Reunification Korea, South Korea, North Korea,*

Pendahuluan

Pecahnya Semenanjung Korea menjadi dua wilayah dilatarbelakangi dengan kekalahan Jepang pada masa perang dunia ke dua. Awalnya semenanjung Korea merupakan bagian dari wilayah imperialis Jepang, namun karena Jepang mengalami kekalahan, maka Jepang menyerah kepada sekutu. Dan Semenanjung Korea diambil alih oleh Uni Soviet (Russia) Dan juga AS. (AEDT, 2013).

Semenanjung Korea berada di bawah kuasa Uni Soviet Dan AS harus menerima kenyataan bahwa negaranya terbelah menjadi dua wilayah dengan pengaruh yang berbeda. Semenanjung terpecah menjadi dua yaitu Korea selatan dibawah pengaruh AS Dan Korea Utara dibawah pengaruh Uni Soviet. Korea Selatan berideologi liberalis, sedangkan Korea Utara cenderung berideologi Komunis karena mendapat pengaruh kuat dari Uni Soviet

Pasca terpecah menjadi dua wilayah, konflik sering mewarnai proses reunifikasi Korea. hal ini terjadi karena dari pihak Korea selatan maupun Korea Utara menggunakan cara mereka masing-masing tanpa ada perundingan terlebih dahulu. Seperti yang dilakukan Korea Utara, pihaknya dengan terang-terangan melakukan intervensi untuk merebut Seoul,

tindakan ini mengundang amarah dari pihak Korea Selatan.

Sempat diadakan gencatan senjata, namun tidak membuat kedua Korea berdamai. bagaimanapun kedua Korea masih dalam status perang karena kedua negara tidak pernah menandatangani kesepakatan damai.

Pada tahun 1998, sebuah kebijakan dibuat oleh Presiden Kim Dae Jung yang dinamai *Sunshine Policy*. Istilah *Sunshine Policy* diambil dari salah satu cerita dongeng dari Korea Selatan yang berkisah tentang upaya angin Dan matahari untuk membuat seorang lelaki melepaskan jaketnya. Dan dengan usaha yang keras, matahari mampu membuat lelaki tersebut melepaskan jaketnya, yang sebelumnya usaha ini gagal dilakukan oleh angin (*sunshine policy*, 2015).

Kebijakan diplomasi milik Presiden Kim Dae Jung ini di gagas untuk menghadapi Korea Utara juga. Kebijakan yang lebih menegdepankan pendekatan secara damai dengan menjalin kerjasama di bidang ekonomi Dan kemanusiaan serta memajukan rekonsiliasi untuk mengarah pada penyatuan Korea kembali (Rio Rio Sugianto, 2015).

Sunshine Policy menunjukkan hasil yang bagus bagi hubungan kedua negara, hal tersebut ditandai dengan diundangnya

pemimpin Hyundai yaitu Chung Ju-Yung ke Korea Utara oleh Presiden Kim Jong Il pada Oktober 1998 untuk membicarakan kesepakatan kerjasama. Dan peresmian salah satu tempat di Korea Utara untuk dijadikan tempat wisata (Sasmithaningtyas Laraswari, 2015).

Sunshine Policy di bawah pemimpin Presiden Kim Dae Jun banyak memberikan kemajuan hubungan kedua negara, Presiden Kim juga mengizinkan perusahaan-perusahaan milik Korea Selatan untuk beroperasi di Korea Utara dan menanamkan investasi disana.

Konferensi tingkat tinggi antar Korea pun diselenggarakan sebagai bentuk terrealisasinya *Sunshine Policy*. Namun tidak sampai disitu, pertemuan keluarga yang terpisah akibat perang Korea berhasil dilakukan pada tahun 2000. Dengan sejumlah pencapaian yang telah dicapai oleh Korea Selatan dalam upaya perdamaian, serta keberhasilan presiden Kim dalam menggagas *Sunshine Policy*, maka ia memperoleh Nobel Perdamaian (Yang Seung-yoon, 2003).

Masih di tahun 2000, kedua Korea memperlihatkan hubungan yang damai serta keakraban pada saat Olimpiade di Sydney. Kedua Korea masuk secara bersamaan dengan membawa bendera

Semenanjung Korea pada pembukaan Olimpiade. Namun sayangnya di tahun 2002, diketahui bahwa Korea Utara secara diam-diam melakukan pengembangan senjata nuklir. Serta di susul dengan adanya Pertempuran diperbatasan pada tanggal 29 Juni 2002. Perang ini menewaskan 4 pelaut korsel, dan korban dari pihak Korea Utara tidak diketahui berapa jumlah yang pasti. Namun dikabarkan bahwa kapal dari pihak Korea Utara tenggelam. (Gunawan, 2002). Kejadian ini membuat implementasi *Sunshine Policy* sedikit longgar.

Sunshine Policy kemudian dilanjutkan oleh presiden pengganti Kim Dae Jung, yaitu Roh Moo Hyun. *Sunshine Policy* era Roo berfokus pada kerjasama ekonomi yang dapat menghantarkan kedua negara pada dialog untuk membicarakan program nuklir yang menghambat proses rekonsiliasi dan Reunifikasi Korea. Roo melakukannya dengan lebih lembut jika dibandingkan Kim Dae Jung. Roo percaya bahwa rekonsiliasi kedua Negara harus dicapai dengan itikad yang baik supaya tidak terjadi kecurigaan dan tetap menjaga kerjasama supaya hubungan kedua negara tetap harmonis.

Mengikuti jejak pemimpin sebelumnya, *Sunshine Policy* merupakan agenda utama bagi Roh dalam upaya perdamaian, penghentian nuklir Korea Utara serta Rekonsiliasi Korea. Walaupun

melanjutkan kebijakan sebelumnya, namun terdapat perbedaan seperti penambahan prinsip dan sebagainya dalam menjalankan *Sunshine Policy*. Dalam masa pemerintahan, Roh lebih memilih untuk menggabungkan semua aspek yang berkaitan dengan upaya reunifikasi Korea kedalam satu kebijakan, dan tidak memisahkan urusan politik dengan ekonomi seperti yang dilakukan pada era pemerintahan Kim Dae Jung. Karna dikhawatirkan akan memberikan hasil yang sama seperti sebelumnya. penggabungan semua aspek ke dalam satu kebijakan dirasa sangat cocok bagi Roo dalam upaya reunifikasi Korea.

Implementasi *Sunshine policy* pada era Roo dapat dikatakan puncaknya apalagi dengan karakternya yang benar-benar anti terhadap AS, sehingga Roo hanya berfokus pada Korea Utara terkait bagaimana melakukan pendekatan terhadap Korea Utara untuk dapat menjalankan *Sunshine Policy* yang baik. Hal itu di dapat dilihat dengan banyaknya komunikasi serta dialog yang dilakukan kedua negara. Dialog yang dilakukan dengan itikad yang baik menghasilkan kerjasama yang baik pula. Sebanyak 56 pertemuan yang berhasil diselenggarakan sampai akhir tahun 2004 Dan 44 perjanjian telah ditandatangani. Peresmian kawasan Gunung Keum-kang pada tahun 2003, Dibukanya Kawasan

Industri Kaesong di tahun 2004. Empat dari lima belas perusahaan Korea Selatan telah melakukan produksi langsung di Korea Utara. Di akhir tahun 2006 sekiranya sekitar 300 perusahaan mulai pindah Dan berproduksi di Korea Utara, ada lebih dari 2000 perusahaan milik Korea Selatan yang berinvestasi di kawasan Industri Kaesong (putri, 2015).

Bagaimanapun juga, Dimasa pemerintahan Presiden Roo *Sunshine Policy* nyatanya memperlihatkan implementasi yang buntu untuk membuat korea bersatu. Banyaknya opini publik yang menyebut Presiden Roo kurang berhasil dalam menjalankan *Sunshine Policy* walaupun telah memusatkan perhatiannya pada Korea Utara Dan tidak berpihak pada Amerika Serikat seperti pemimpin sebelumnya. Walaupun disisi lain, telah banyak aspek yang telah dicapai. Kebuntuan implementasi ini kemudian menjadi pertimbangan Lee Myung Bak dalam membuat kebijakan.

Lee Myung Bak terpilih sebagai Presiden pengganti Roh Moo Hyun. Di masa pemerintahan Presiden Lee Myung Bak, segala jenis bantuan untuk Korea ditarik. Penarikan bantuan dilakukan karna sikap Korea Utara yang tidak kunjung menghentikan pengembangna nuklir Dan terus melakukan uji coba nuklir. Beberapa kali Presiden Lee Myung Bak ingin

menghentikan Sunshine Policy, namun ada saja halangan yang mengharuskan ia agar terus mengurungkan niatnya.

Tepatnya pada tanggal 23 april 2009, Kolonel Lee Sang-chul dari Divisi Kebijakan Korea Utara Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan pada duta besar amerika yaitu Kathleen Stephens bahwa Korea Utara sedang mengalami peningkatan dalam keterpurukan ekonomi berupa kekurangan bahan pangan yang mencapai pada tingkat krisis. krisis ini di duga karna adanya ketidakpuasan dari elit-elit tertentu sejak pemimpin mereka Kim Jong Il mengalami gangguan kesehatan sejak bulan agustus 2008 (chinoy, 2011).

Hal serupa juga disampaikan oleh Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Untuk Asia Timur yaitu Kurt Campbell ketika bertemu dengan menteri Unifikasi Korea Selatan Hyun In-taek pada bulan juni 2009.

Tidak lama dari krisis tersebut, pimpinan tertinggi Korea Utara Kim Jong Il dinyatakan meninggal karna sakit yang dideritanya. Secara otomatis, kekuasaan digantikan oleh anaknya yang bernama Kim Jong Un. Pergantian kekuasaan tidak lantas membuat Korea Utara semakin membaik, kondisi Korea Utara dikabarkan justru bertambah parah. Bukan hanya dalam bidang ekonomi yang mengalami krisis,

namun hubungan di Semenanjung Koreapun ikut mengalami pergolakan. Tepatnya dua hari pasca pemakaman Kim Jong-il, Korea Utara mengeluarkan pernyataan permusuhan terhadap Korea Selatan dengan alasan Presiden Lee tidak ikut bergabung saat pemakaman Kim Jong-II (demi perdamaian, korsel ajak korut berdialog, 2012), dan juga dikarnakan pemutusan bantuan dari Presiden Lee dengan menuntut penghentian senjata Nuklir.

Beberapa bulan kemudian Laporan tahunan Korea Selatan Kementrian Unifikasi menyebut *Sunshine Policy* sebagai kebijakan damai dengan Korea Utara dinyatakan gagal (south korea formally declares end to sunshine policy, 2010).

Studi Pustaka

Untuk menjawab pertanyaan mengapa Presiden Lee Myung Bak tidak melanjutkan *Sunshine Policy* sebagai kebijakan politik Luar negeri Korea Selatan terkait reunifikasi Korea, maka penulis akan menggunakan konsep pengambilan keputusan politik luar negeri oleh William D coplin Dan juga konsep kepentingan nasional oleh Jack C plano Dan Roy Olton.

Konsep pengambilan keputusan oleh William D coplin memusatkan perhatian pada aktor-aktor ataupun oarng

yang memiliki peran penting serta tanggung jawab dalam mengambil keputusan suatu negara. Dalam bukunya William D coplin mengatakan bahwa Salah besar jika kita menganggap bahwa para pengambil keputusan politik luar negeri bertindak sembarangan. Akan tetapi sebaliknya, tindakan politik luar negeri tertentu yang diambil mungkin bisa dipandang sebagai akibat dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil keputusan politik luar negeri. Pertama, kondisi politik dalam negeri yang mempengaruhi keputusan politik luar negeri. Kedua, kemampuan ekonomi Dan militer. Dan yang ketiga ialah konteks internasional yaitu posisi khusus negara dalam hubungannya dengan negara lain dalam sistem itu (Coplin, 2003)

Dalam kasus sunshine policy ini, konteks internasional merupakan faktor yang mempengaruhi Presiden Lee Myung Bak dalam mengambil keputusan untuk menghentikan *Sunshine Policy* Dan tidak lagi menggunakannya sebagai kebijakan politik luar negeri Korea Selatan dalam upaya reunifikasi Korea. Korea Utara merupakan negara tujuan Korea Selatan untuk memperbaiki hubungan kedua Negara. Kebijakan yang dibuat tentunya di tujukan untuk Korea Utara. sehingga tingkah laku ataupun sikap Korea Utara

sangat mempengaruhi kebijakan yang di buat.

Presiden Lee Myung Bak tentunya sudah memikirkan banyak pertimbangan untuk tidak menggunakan *Sunshine Policy*, Dan memilih untuk menggunakan kebijakan baru yang lebih tegas.

Konsep kedua yaitu konsep kepentingan nasional oleh Jack C plano Dan Roy Olton. Pada dasarnya, kebijakan yang dibuat suatu negara pastilah memiliki kaitan dengan kepentingna nasional yang dimiliki oleh negara. Keputusan diambil karna ada kepentingna nasional yang ingin dicapai. Menurut Jack C plano, kepentingan Nasional adalah "Tujuan mendasar dan penentu utama yang menuntun pembuat keputusan Negara dalam membuat kebijakan luar negeri. kepentingan nasional suatu negara biasanya konsepsi yang sangat umum dari elemen-elemen yang merupakan kebutuhan paling vital suatu Negara. Termasuk Kemerdekaan, Pelestarian Diri, Integritas Teritorial, Keamanan Militer, Kesejahteraan Ekonomi ". (Jack C Plano, 1969)

Sebagaimana pembahasan sebelumnya dapat dilihat bahwa keputusan ataupun kebijakan yang dibuat bertujuan untuk mencapai Integritas Teritorial, Keamanan Militer Korea Selatan. Pasca perang disemanjung Korea, keamanan

nasional Korea Selatan memang terancam oleh tindakan Korea Utara yang terus melakukan pengembangna serta uji coba nuklir. Wilayah yang berdekatan membuat keadaan Korea Selatan tidak nyaman. Bagaimanapun juga, apa yang dilakukan Korea Utara akan berdampak pada Korea Selatan. Sehingga sebisa mungkin Korea Selatan harus bisa menjaga keamanan nasional nya dengan cara apapun, termasuk membuat kebijakan yang keras untuk korea Utara.

Pembahasan

Sunshine Policy merupakan kebijakan yang digagas untuk menciptakan perdamaian yang mengarah pada rekonsiliasi Korea nyatanya tidak memebrikan hasil yang efektif. hal ini sudah terlihat pada masa pemerintahan Presiden Roh Moo Hyun, dimana Korea Utara mulai melakukan uji coba nuklir. Meskipun demikian, presiden Roh masih terus mencoba untuk tetap mempertahankan sunshine policy.

Banyaknya bantuna yang diberikan untuk Korea Utara pada Pemerintahan Presiden Roh nyatanya menimbulkan banyak opini publik yang beranggapan bahwa apa yang dilakukan Presiden Roh hanyalah memperkuat rezim komunis Korea Utara Dan tidak bisa menghentikan tindakan Korea Utara dari pengentian

program nuklirnya. Implementasi yang longgar inilah yang membuat *Sunshine Policy* menjadi banyak pertimbangan untuk dilanjutkan.

Pemerintahan selanjutnya yaitu presiden Lee Myung Bak yang merupakan mantan CEO sebuah perusahaan ternama di Korea yaitu *Hyundai Engineering and Construction* serta mantan walikota Seoul (herman, 2007) memilih untuk tidak menggunakan *Sunshine Policy* Dan menggantinya dengan kebijakan yang lebih keras terhadap Korea Utara dengan menghubungkan bantuan ekonomi pada pembongkaran program senjata nuklir Korea Utara (Kim, 2011).

Demi memperlancar kerjasama dengan Korea Utara supaya mempermudah upaya rekonsiliasi Korea, maka proyek-proyek kerjasama ekonomi antar Korea dimasa Lee Myung Bak mencakup empat prinsip yaitu denuklirisasi, Kebutuhan Ekonomi, Ketersediaan Sumber Daya Dan Konsensus Nasional. Prinsip-prinsip ini tentunya sangat kontras dengan *Sunshine Policy* karna sama –sama mempromosikan kerjasama ekonomi (putri, 2015). perlu adanya timbal balik dalam kerjasama ini supaya menghasilkan hubungan Korea yang simetris. Jika tidak ada timbal balik, maka satu pihak mengalami kerugian Dan satu pihak bisa jadi mengambil keuntungan lebih banyak seperti yang dialami Korea

selatan. Terus memberi tanpa mengharap imbalan dari Korea Utara membuat hubungan kedua Korea tidak baik.

Sunshine Policy mengambil pendekatan umum untuk hubungan kedua Korea. Korea Selatan yang menekankan kerjasama Dan non-paksa. Prinsip non-paksa inilah yang menurut Presiden Lee menjadikan Korea Selatan lemah sehingga Korea Utara bersikeras untuk tetap melakukan pengembangan nuklir. Jika Korea selatan sedikit menekan Dan tegas terhadap Korea, setidaknya Korea utara memiliki rasa segan Dan akan berfikir dua kali untuk melakukan pengembangan serta uji coba nuklir. Jika prinsip non-paksa terus diterapkan, dapat dipastikan upaya rekonsiliasi tidak akan pernah berjalan mulus Dan terus mengalami kendala pada pengembangan nuklir Korea Utara.

Kebijakan yang tentunya dibuat untuk menekan Korea Utara dari pengembangan nuklir yang sangat mengancam keamanan nasional korea utara. Beberapa data menyebutkan nama kebijakan tersebut ialah *MB Doctrine* atau *Denuclearization and Opening 3000* (Khamidov, 2008). Adapun Point dari MB Doctrine ialah sebagai berikut : (1) Denuklirisasi lengkap Dan pembukaan oleh Korea Utara serta mendesak keputusan strategis Presiden Kim Jong-Il. (2) Diplomasi pragmatis yang dijalankan

berdasarkan konsensus nasional. (3) Penguatan Aliansi Korea Selatan-U.S untuk melindungi Dan mempromosikan kepentingan bersama berdasarkan nilai demokrasi. (4) perluasan diplomasi Asia dalam kerjasama kemitraan dengan negara-negara lain nya yang ikut bergerak menuju era Asia yang terbuka. (5) diplomasi energi untuk bergabung dengan kelompok negara dengan ekonomi yang maju. (6) diplomasi budaya untuk memanfaatkan soft power korea melalui saling membuka bursa di kawasan dunia (kim, 2007). Namun perlu diketahui bahwa sebagian dari point tersebut tidak dimaksudkan untuk Korea Utara. point yang berkaitan dengan nuklirlah yang ditujukan untuk Korea Utara.

Kepemilikan nuklir serta uji coba nuklir oleh korea utara tidak pernah luput dari perhatian setiap pemimpin Korea Selatan. Dan kali ini, uji coba nuklir yang dilakukan Korea utara menjadi perhatian yang kontras bagi Presiden Lee Myung Bak. Presiden yang memiliki karakter yang berbeda dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Uji coba nuklir atau missil yang membuat Presiden Lee mempertimbangkan *Sunshine Policy* dilakukan pada bulan april Dan mei tahun 2009 tepat setelah setahun Presiden Lee menjabat sebagai Presiden Korea Selatan. Korea Utara beralasan bahwa uji coba nuklir tersebut sebagai perkembangan ilmu

pengetahuan Dan merupakan hak semua orang (korsel unkap pemerasan korut, 2015). Presiden Lee tidak bisa lagi mentoleransi perilaku Korea Utara yang tidak memberikan timbal balik dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Uji coba nuklir tidak saja mengancam Korea Selatan, tetapi juga dapat mengancam negara-negara yang mengelilingi semenanjung Korea.

Pasca perang disemanjung korea, Korea Utara memutuskan untuk melakukan pengembangan nuklir sebagai kekuatan nasional yang digunakan untuk berdiplomasi sertat tawar menawar terhadap negara lain. Dan untuk pertama kalinya Korea Utara memulai proyek pengembangan Nuklir pada tahun 1986 (berlianto, 2016). Dan sejak saat itu juga keamanan Korea Selatan mulai terancam Dan terus melakukan upaya untuk meningkatkannya.

Dalam pengimplementasian kebijakan garis keras, korea selatan di bawah pemimpin Presiden Lee Myung Bak Korea Selatan menghentikan hubungan perdagangan dengan Korea Utara dan Presiden lee berusaha memperkuat aliansinya dengan AS dengan cara melakukan latihan militer bersama untuk menekan program nuklir Korea Utara serta mempererat kerjasama bilateral dengan negara negara yang mengelilingi Semenanjung Korea termasuk jepang. Dan

mengambil pendekatan yang lebih agresif Dan fleksibel. Selain itu Presiden Lee juga memotong anggaran negara untuk kerjasama kedua Korea sebagai bentuk protes dari nuklir Dan bantuan kemanusiaan (djelantik, 2015). Adapun upaya lain yang dilakukan untuk memberi efek jera pada Korea Utara ialah dengan menyerukan larangan berlayar bagi Kapal Korea Utara, mengentikan perdagangan dengan Korea Utara, membatasi kontak antar Korea. pengurangan serta penarikan investasi Korea Selatan di Korea Utara, serta menarik orang-orang yang bekerja di industri Kaesong

Beberapa tindakan lain yang mengundang amarah Presiden Lee untuk positif tidak menggunakan *Sunshine Policy* ialah adanya serangan terhadap kapal Cheonan milik Korea Selatan yang menewaskan 46 orang (korsel ancam serang korut, 2010). Presiden Lee terus melakukan dialog namun upaya yang dilakukan tidka membuahkan hasil. Tindakan yang dilakukan Korea Utara tentunya memperlambat proses Reunifikasi Korea. Upaya reunifikasi Korea serta perdamaian di Semenanjung Korea akan berjalan jauh lebih baik dari Prospek konflik senjata jika Korea mau membasmi nuklirnya. Jalan perdamaian seharusnya lebih dikembangkan Dan ditingkatkan lewat dialog-dialog serta upaya-upaya Soft

Diplomacy, tanpa saling tebar kekuatan Dan saling menyerang dengan kebijakan yang dibentuk

Adapun alasan lain yang membuat sunshine policy tidak dilanjutkan ialah isu HAM yang terjadi di Korea Utara. isu ham juga menjadi perhatian khusus untuk Presiden Korea Selatan, karna isu tersebut ada kaitannya dengan kepentingannya Korea Selatan. Korea Utara merupakan negara yang menganut sistem komunis, sehingga membuat rakyatnya banyak mendapat ketidakadilan dari penguasa Korea Utara. sehingga Presiden Lee menyuarakan pendapatnya tentang isu tersebut. Presiden Lee mengatakan bahwa pemerintahan Korea Selatan harus memastikan bahwa isu-isu HAM di Korea Utara harus segera diatasi. (Sung, 2007).

Pasca perang Korea, banyak warga Korea yang menjadi tahanan di Korea Utara. Diyakini bahwa ribuan warga Korea Selatan telah diculik selama perang. Besar harapan rakyat pada pemerintahan Lee untuk menempatkan Dan juga memprioritaskan pada penyelesaian isu HAM di Korea Utara. karna tidak dapat dipungkiri bahwa setidaknya ada sebagian warga mereka yang mendapat perlakuan tidak adil di Korea Utara.

Menurut laporan Pemerintah, sekitar 200.000 warga Korea Utara pada saat itu

dipaksa untuk bekerja di camp konsentrasi tanpa adanya pengadilan dari pemerintah. Dan Pyongyang menolak untuk menangani pemulangan tahanan Korea Selatan Dan orang-orang yang di duga diculik oleh Korea Utara. Dan Pyongyang menolak untuk menangani pemulangan tahanan Korea Selatan Dan orang-orang yang di duga diculik oleh Korea Utara (Ki, 2007).

Pemerintahan sebelumnya tidak pernah mengangkat ataupun membahas isu HAM dalam politik luar negerinya terhadap Korea Utara, dikarenakan akan mempengaruhi kerjasama yang telah dijalani. Hal ini tentunya berdampak buruk, mengingat bahwa untuk menuju rekonsiliasi tentunya membutuhkan pendapat rakyat. Namun jika rakyatnya belum bisa dilindungi, maka rekonsiliasi tidak akan berjalan mulus.

Pelanggaran HAM di Korea Utara sebenarnya sudah mulai diperhatikan oleh komunitas internasional 5 tahun sebelum Lee Myung Bak menjabat sebagai Presiden Korea Selatan. Sudah ada beberapa kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan HAM di Korea Utara. seperti mengadopsi serangkaian resolusi HAM yang dilakukan PBB untuk Korea Utara serta menugaskan seorang mata-mata atau pelapor khusus yang diperintahkan untuk melaporkan situasi HAM di Korea Utara. Bahkan LSM pun ikut serta mengambil

peran dengan mencoba membawa pemimpin Korea Utara Kim Jong-Il ke pengadilan kriminal Internasional untuk mempertanggung jawabkan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negaranya (A, 2008). Namun tidak membuahkan hasil.

Untuk menindak lanjutinya, Presiden Lee merubah kebijakannya terhadap Korea Utara terutama dalam upaya reunifikasi Korea dengan strategi yang lebih keras. Isu HAM memang seharusnya segera di selesaikan. Korea Utara tidak bisa selamanya bertindak seperti ini. Jika terus dilanjutkan, maka akan banyak juga negara-negara lain yang akan ikut campur dengan permasalahan ini. Yang membuat reunifikasi semakin sulit untuk dicapai.

Walaupun tidak seharusnya Korea Selatan ikut campur dalam Isu HAM di Korea Utara, namun karena isu HAM itu sendiri menimpa warganya yang berada di Korea Utara dan belum diketahui bagaimana keadaan pastinya, maka sangatlah tidak mungkin jika Korea Selatan tidak ikut campur dan Presiden Lee selaku pemimpin tertinggi Korea Selatan tentunya juga mengambil serangkaian tindakan yang dapat mengurangi kasus isu HAM di Korea Utara serta mendapatkan kembali beberapa warganya yang di tawan.

Kesimpulan

Alasan Presiden Lee Myung bak tidak melanjutkan Sunshine Policy terkait reunifikasi Korea dijelaskan dengan konsep kepentingan nasional dan konsep pengambil keputusan. Keputusan yang dibuat Presiden Lee berupa kebijakan yang ditujukan untuk Korea Utara dalam upaya Reunifikasi Korea tentunya dibuat berdasarkan tujuan mendasar yang menjadi kepentingan Korea Selatan dalam berpolitik.

Terdapat dua alasan mengapa Presiden Lee tidak menggunakan sunshine policy. Alasan pertama yaitu uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara. Terpilihnya Lee Myung Bak sebagai Presiden Korea Selatan menandai pemerintahan yang konservatif dan pragmatis, Presiden Lee memiliki pandangan yang berbeda dengan pemimpin sebelumnya. Menurutnya, untuk menghentikan Nuklir Korea yang memperlambat reunifikasi, maka harus menggunakan strategi yang lebih keras. Presiden Lee menarik semua bentuk kerjasama bantuan yang pernah dilakukan oleh presiden sebelumnya. Presiden Lee mengatakan bantuan hanya bisa diberikan jika Korea Utara bersedia membongkar nuklir dan berhenti melakukan serangan terhadap Korea Selatan.

Alasan yang kedua yaitu Isu HAM di Korea Utara. Isu HAM merupakan salah satu kepentingan yang ingin dituju oleh Korea Selatan karena Isu melibatkan warga negara Korea Selatan yang secara tidak sadar isu ternyata menunjukkan bahwa Korea Selatan belum bisa meningkatkan keamanan negaranya, karena isu tersebut belum bisa diselesaikan.

Kegagalan *Sunshine Policy* di masa pemerintahan presiden Roh menjadi pertimbangan Presiden Lee dalam memutuskan kebijakan selanjutnya dalam menghadapi Korea demi tercapainya reunifikasi. *Sunshine Policy* resmi dihentikan pada tahun 2010 dan digantikan oleh Hardline Policy.

[Notes]

[1] *korsel ancam serang korut*. (2010, november 30). Retrieved february 18, 2017, from jpnn:

<http://www.jpnn.com/news/korsel-ancam-serang-korut>

[2] *south korea formally declares end to sunshine policy*. (2010, november 17). Retrieved february 22, 2017, from VOA:

<http://www.voanews.com/a/south-korea-formally-declares-end-to-sunshine-policy--108904544/130750.html>

[3] *demi perdamaian, korsel ajak korut berdialog*. (2012, januari 03). Retrieved januari 03, 2017, from liputan6:

<http://global.liputan6.com/read/370370/demi-perdamaian-korsel-ajak-korut-berdialog>

[4] *korsel ungkap pemerasan korut*. (2015, januari 30). Retrieved february 15, 2017, from sindonews: <https://nasional.sindonews.com/read/957792/149/korsel-ungkap-pemerasan-korut-1422590792>

[5] *sunshine policy*. (2015, oktober 27). Retrieved januari 30, 2017, from the new encyclopedia: http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Sunshine_policy

[6] A, y. j. (2008, maret 07). *president lee should bring freedom and human right to north korean people*. Retrieved maret 03, 2017, from DailyNK: <http://www.dailynk.com/english/m/read.php?cataId=nk00300&num=3359>.

[7] AEDT. (2013, april 05). *Sejarah di balik ketegangan Korea Utara dan Korea Selatan: kilas balik*. Retrieved november 11, 2016, from radio australia: <http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2013-04-05/sejarah-di-balik-ketegangan-korea-utara-dan-korea-selatan-kilas-balik/1112046>

[8] berlianto. (2016, september 10). *sejarah nuklir korut, dari pembangkit listrik menjadi senjata*. Retrieved february 24, 2017, from sindonews: <https://international.sindonews.com/read/1138254/4/1/sejarah-nuklir-korut-dari-pembangkit-listrik-menjadi-senjata-1473474477>

[9] chinoy, m. (2011, januari 01). *how south korea's tough policy on north backfired*. Retrieved february 23, 2017, from CNN: <http://edition.cnn.com/2010/OPINION/12/31/nkorea.wikileaks/>

[10] Coplin, W. D. (2003). *Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoritis*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

[11] djelantik, s. (2015). *asia-pasifik: konflik, kerjasama dan relasi dan antarkawasan*. yayasan pustaka obor indonesia.

- [12] gunawan, r. (2002, juni 29). *pertempuran berdarah korsel-korut di laut perbatasan* . Retrieved februari 2017, 09 , from liputab6 global: <http://global.liputan6.com/read/2261017/29-6-2002-pertempuran-berdarah-korsel-korut-di-laut-perbatasan>
- [13] herman, b. (2007, desember 19). *former hyundai CEO lee myung bak claims victory in south korean presidential election* . Retrieved februari 27, 2017, from deseret news: <http://www.deseretnews.com/article/695237381/Former-Hyundai-CEO-Lee-Myung-bak-claims-victory-in-South-Korean-presidential-election.html>
- [14] Jack C Plano, .. R. (1969). *the international relations dictionary*. michigan: western michigan university.
- [15] Khamidov, A. (2008). the lee myung bak revolution: explaining continuity and change in south korea's foreign policy. In A. Khamidov, *SAIS U.S.-Korea yearbook 2008* (p. 25). Johns Hopkins University.
- [16] ki, j. s. (2007, 12 24). *Lee Myung-bak to Revise Sunshine Policy*. Retrieved 11 23, 2016, from the korea times: http://www.koreatimes.co.kr/www/news/special/2009/11/180_16071.html
- [17] Kim, H. N. (2011). the lee government's policy toward the denuclearization of north korea and its implications for south-north korea relations. *internasional journal of korean studies*, 3.
- [18] kim, t. (2007, desember 02). *lee myung bak's foreign policy*. Retrieved maret 02, 2017, from korea times: http://www.koreatimes.co.kr/www/news/opinion/2015/02/167_14766.html
- [19] putri, v. (2015). pengaruh karakteristik pemimpin korea selatan terhadap implementasi sunshine policy tahun 1998-2010. *jurnal analisis hubungan internasional*, 1971.
- [20] rio ria sugianto, d. (2015, oktober 20). *Korea Selatan & Korea Utara dalam bingkai "Sunshine Policy"*. Retrieved november 11, 2016, from situs ilmu hubungan internasional: <http://www.ilmu-hi.com/korea-selatan-korea-utara-dalam-bingkai-sunshine-policy/#>
- [21] sasmithaningtyas laraswari, m. k. (2015, september). *dinamika implementasi sunshine policy oleh korea selatan dalam rangka reunifikasi korea (1998 - 2003)*. Retrieved november 12, 2016, from naskah ringkas i: <http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-09/S47268-Sasmithaningtyas%20Prihasti%20Laraswari>
- [22] sung, j. j. (2007, oktober 22). *analysis of lee myung bak's policy toward north korea*. Retrieved februari 14, 2017, from dailyNK: <http://www.dailynk.com/english/read.php?cataId=nk00400&num=2561>.
- [23] yang seung-yoon, m. m. (2003). *masyarakat politik dan pemerintahan korea: sebuah pengantar* . yogyakarta: gadjah mada university.